



# **PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025**

## PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya maka laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama antara kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 9/KPT.W18-U/OT1.6/I/2026 tanggal 05 Januari 2026 yang mana laporan ini menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang yaitu administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, bagian pengawasan dan pengadaan sarana dan prasarana .

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta ini kami sajikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sangatta, 20 Januari 2026

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, M.H

# DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
BAB II.....	7
A. KEADAAN PERKARA.....	7
— Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	7
— Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
— Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	8
— Keadaan Perkara Peninjauan Kembali / PK.....	8
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	10
— Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.....	10
— Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.....	11
— Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.....	12
— Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi.....	12
— Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi.....	12
— Perkara Perdata Yang Menggunakan <i>E-Court</i> .....	13
— Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu).....	13
— Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).....	13
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....	14
— Posbakum.....	14
— Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	15
— Perkara Prodeo /Pembebasan Biaya Perkara.....	16
BAB III.....	17
SUMBER DAYA MANUSIA.....	17
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ PENDIDIKAN.....	17
A. MUTASI.....	19
B. PROMOSI.....	20
C. PENSIUN.....	21
D. DIKLAT.....	21
BAB IV.....	27
PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	27
A. Pengelolaan Keuangan.....	27
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	36
BAB V.....	41
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK.....	41
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	41
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	44
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	48
BAB VI.....	53
PENGAWASAN.....	53
A. Internal.....	53
B. Evaluasi.....	54
BAB VII.....	55
PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Rekomendasi.....	55
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025.....	57

# DAFTAR TABEL

Table 1 . Keadaan Perkara Tahun 2025.....	7
Table 2 . Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	8
Table 3 . Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	8
Table 4 . Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali/PK.....	8
Table 5 . Rekapitulasi Perkara Tahun 2025.....	9
Table 6 . Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....	9
Table 7 . Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu .....	10
Table 8 . persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.....	10
Table 9 . Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.....	11
Table 10 . Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	11
Table 11 . Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	11
Table 12 . Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.....	12
Table 13 . Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi .....	12
Table 14 . Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....	12
Table 15 . — Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court.....	13
Table 16 . — Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) .....	13
Table 17 . Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) .....	13
Table 18 . Data Pelayanan Posbakum .....	14
Table 19 . Pagu dan Realisasi untuk Posbakum .....	15
Table 20 . Pagu dan Realisasi untuk Sidang Keliling.....	15
Table 21 . Pagu dan Realisasi Perkara Prodeo.....	16
Table 22 . Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Sangatta per tanggal 31 Desember 2025 .....	18
Table 23 . Rekapitulasi data pendidikan hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta..	18
Table 24 . data kepangkatan / golongan ruang pada Hakim dan Pegawai.....	18
Table 25 . Data PPNN yang dibiayai DIPA sampai dengan bulan Agustus 2025 .....	19
Table 26 . Data PPNN yang dibiayai DIPA sampai dengan bulan Desember 2025.....	19
Table 27 . Data mutasi pegawai Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2025.....	20
Table 28 . Promosi untuk tahun 2025.....	21
Table 29 . Data Pensiun Pegawai Tahun 2025 .....	21
Table 30 . bimtek bagi SDM Teknis maupun Non Teknis baik secara online maupun secara offline	25
Table 31 . Realisasi belanja pegawai dan belanja operasional kantor untuk DIPA 01 tahun 2025	27
Table 32 . Realisasi belanja untuk DIPA 03 .....	28
Table 33 . Revisi DIPA 01 .....	28
Table 34 . Revisi DIPA 03 .....	28
Table 35 . Rekapitulasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 .....	29
Table 36 . Data Keuangan Perkara .....	29
Table 37 . Tanah Pada Pengadilan Negeri Sangatta .....	30
Table 38 . Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sangatta .....	30
Table 39 . Rumah Dinas .....	31
Table 40 . Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 .....	31
Table 41 . Daftar Barang Milik Negara Yang disetujui Dihapus Pada Pengadilan Negeri Sangatta	32
Table 42 . Ruangan Pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sangatta .....	33
Table 43 . Peralatan dan Mesin .....	34
Table 44 . Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Pengadilan Negeri Sangatta .....	35
Table 45 . Pendaftaran perkara melalui e-Court.....	36
Table 46 . Pendaftaran Upaya Hukum dan Eksekusi melalui E-Court.....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Sangatta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara tingkat pertama di wilayah hukum kabupaten Kutai Timur. Pengadilan Negeri Sangatta merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengalon , Kecamatan Busang, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Long Mesengat, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Telen dan Kecamatan Teluk Pandan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

## **VISI DAN MISI**

### **VISI**

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sangatta adalah :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA YANG AGUNG”**

### **MISI**

Misi adalah suatu tahapan atau proses yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Begitu juga dengan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencapai visi maka misi dari Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta

Demi suksesnya visi dan misi tersebut maka asas independensi harus menjadi pengawal tugas-tugas peradilan. Dalam arti bahwa suatu proses dalam peradilan harus benar-benar terbebas dari pengaruh Pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jadi independensi peradilan merupakan salah satu dasar demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.

### **MOTTO**

Motto dari Pengadilan Negeri Sangatta kelas II adalah S I A P (SANTUN, INOVATIF, AKUNTABEL, PROFESIONAL)

Dari Motto tersebut mempunyai makna filosofis sebagai berikut :

- 1) *SANTUN*: Sebagai pelayan masyarakat tentunya harus memiliki sikap dan tutur kata yang santun, dimana sikap dan tutur kata dapat mencerminkan kepribadian kita.
- 2) *INOVATIF*: Inovatif disini dimaksudkan setiap pegawai bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi kemajuan Pengadilan Negeri Sangatta, baik dari sikap dan perilaku dan ide-ide yang bisa dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi yang ada demi memudahkan proses informasi tentang pelayanan hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Sangatta dan sebagainya.
- 3) *AKUNTABEL* : Dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan menurut tugas dan kewenangannya, aparaturnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *PROFESIONAL* : Dalam menjatuhkan putusan para hakim bersikap profesional, tidak mendukung pihak manapun, putusan yang diberi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi para pegawai bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi serta disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang dilaksanakan.

## BAB II

### A. KEADAAN PERKARA

Pengadilan Negeri Sangatta menangani perkara pidana dan perkara perdata. Jumlah perkara pidana dan perkara perdata yang ditangani dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

#### — Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Beban Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara
<b>PIDANA</b>						
1	Pidana Biasa	58	524	582	537	45
2	Pidana Cepat	0	44	44	44	0
3	Pidana Anak	0	20	20	20	0
4	Praperadilan	0	1	1	1	0
5	Pidana Lalu- Lintas	0	3420	3420	3420	0
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>4009</b>	<b>4067</b>	<b>4022</b>	<b>45</b>
<b>PERDATA</b>						
1	Perdata Gugatan	22	64	86	73	13
2	Perdata Permohonan	4	128	132	130	2
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	4	4	4	0
4	Perdata Bantahan	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>196</b>	<b>222</b>	<b>207</b>	<b>15</b>

Table 1. Keadaan Perkara Tahun 2025



### — Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Keterangan
1	Pidana Biasa	52	
2	Pidana Cepat	0	
3	Pidana Anak	0	
4	Perdata Gugatan	14	
5	Perdata Permohonan	0	
6	Gugatan Sederhana	0	
7	Bantahan	0	
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	

Table 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

### — Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Keterangan
1	Pidana Biasa	16	
2	Pidana Cepat	0	
3	Pidana Anak	0	
4	Perdata Gugatan	7	
5	Perdata Permohonan	0	
6	Gugatan Sederhana	0	
7	Bantahan	0	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	

Table 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

### — Keadaan Perkara Peninjauan Kembali / PK

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Keterangan
1	Pidana Biasa	3	
2	Perdata Gugatan	8	
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	

Table 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali/PK

Berikut rekapitulasi perkara tahun 2025 baik perkara pidana maupun perkara perdata

No	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Banding	Kasasi	PK
<b>PIDANA</b>						
1	Pidana Biasa	524	537	52	16	3
2	Pidana Cepat	44	44	0	0	0
3	Pidana Anak	20	20	0	0	0
4	Praperadilan	1	1	0	0	0
5	Pidana Lalu-Lintas	3420	3420	0	0	0
<i>Jumlah</i>		<b>4009</b>	<b>4022</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>PERDATA</b>						
1	Perdata Gugatan	64	73	14	7	8
2	Perdata Permohonan	128	130	0	0	0
3	Perdata Gugatan Sederhana	4	4	0	0	0
4	Perdata Bantahan	0	0	0	0	0
<i>Jumlah</i>		<b>196</b>	<b>207</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Table 5. Rekapitulasi Perkara Tahun 2025

Rekapitulasi perkara tidak mengajukan upaya hukum

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Keterangan
1	Pidana Biasa	529	
2	Perdata Gugatan	59	
<i>Jumlah</i>		<b>588</b>	

Table 6. Rekapitulasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### — Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Bila dilihat dari jenis perkara yang masuk, perkara yang diputus dan perkara yang diputus tepat waktu, baik perkara pidana dan perkara perdata maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus 2025	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
1	Pidana Biasa	524	537	536
2	Pidana Cepat	44	44	44
3	Pidana Anak	20	20	20
4	Pidana Praperadilan	1	1	1
5	Pidana Lalu Lintas	3420	3420	3420
6	Perdata Gugatan	64	73	54
7	Perdata Permohonan	128	130	130
8	Perdata Gugatan Sederhana	4	4	4
9	Perdata Bantahan	0	0	0
Jumlah		4.205	4229	4209

Table 7. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Dan untuk persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Bulan	Perkara Yang Diputus	Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Januari	49	46	90	97,52	108,35
2	Februari	49	46			
3	Maret	88	85			
4	April	62	62			
5	Mei	62	62			
6	Juni	57	56			
7	Juli	94	93			
8	Agustus	45	42			
9	September	67	66			
10	Oktober	59	57			
11	November	80	78			
12	Desember	96	95			
Jumlah		808	788			

Table 8. persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu



— **Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali**

No	Perkara	Putus	Tidak Banding	Tidak Kasasi	Tidak PK
1	Pidana Biasa	537	485	521	534
2	Pidana Cepat	44	44	44	44
3	Pidana Anak	20	20	20	20
4	Praperadilan	1	1	1	1
5	Pidana Lalu Lintas	3420	3420	3420	3420
6	Perdata Gugatan	73	59	66	65
7	Perdata Permohonan	130	130	130	130
8	Perdata Gugatan Sederhana	4	4	4	4
9	Perdata Bantahan	0	0	0	0
Jumlah		4229	4163	4206	4.218

Table 9. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, baik perkara pidana dan perkara perdata dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah perkara Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	4022	3970	80%	98,43%	123,03%
2	Perdata	207	193			
Jumlah		4229	4163			

Table 10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, baik perkara pidana dan perkara perdata dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus	Jumlah perkara Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	4022	4006	90%	99,45%	110,5%
2	Perdata	207	200			
Jumlah		4229	4206			

Table 11. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

— **Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

No	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Restoratife Justice	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Restoratifr Justice	Target	Realisasi	Capaian
1	87	2	20%	2,29	11,45

Table 12. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

— **Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi**

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara Yang Melaksanakan Mediasi	38	3%	5,26%	175,33%
2	Mediasi Berhasil	2			
3	Mediasi Tidak Berhasil	36			
4	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	0			
5	Mediasi Dalam Proses	0			

Table 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

— **Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi**

No	Klasifikasi Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi	Jumlah layanan E-Berpadu Diversi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	20	4	3	3%	75%	2.500%

Table 14. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi



— **Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court**

No	Jenis Perkara	Menggunakan E-Court	Tidak Menggunakan E-Court	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	64	64	100%	100%	100%
2	Permohonan	128	128			
3	Gugatan Sederhana	4	4			
Jumlah		196	196			

Table 15. — Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court

— **Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

No	Jenis Perkara	Dilimpahkan Secara E-Berpadu	Dilimpahkan Tidak Secara E-Berpadu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	524	524	100%	100%	100%
2	Pidana Anak	20	20			
Jumlah		544	544			

Table 16. — Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

— **Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)**

No	Jenis Layanan	Layanan Perkara Pidana Secara E-Berpadu	Layanan Perkara Pidana Tidak Secara E-Berpadu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelimpahan Berkas	544	544	100%	99,92%	99,92%
2	Penggeledahan	365	365			
3	Penyitaan	879	879			
4	Perpanjangan Penahanan	790	790			
5	Izin Besuk Tahanan	2	2			
6	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	0	0			
7	Diversi	3	1			
8	Pembantaran	0	0			
Jumlah		2583	2581			

Table 17. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

## C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

### — Posbakum

Sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025, Pos Pelayanan Hukum mendapat anggaran sebesar Rp28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) dengan 280 (dua ratus delapan puluh) jam layanan dan target 100 (seratus) orang untuk mendapat layanan dan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur. Dan untuk pengunjung Posbakum sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang yang terdiri dari pengunjung laki-laki sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang dan pengunjung perempuan sebanyak 105 (seratus lima) orang.

Dari jenis layanan yang diberikan oleh Posbakum LBH Suara Rakyat Kutai Timur dari bulan Januari-Desember 2025 untuk pemberian informasi, konsultasi dan Advis hukum sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) layanan, Pembuatan dokumen hukum sebanyak 105 (seratus lima) dokumen, dan untuk layanan informasi sebanyak 104 layanan, organisasi dan bantuan hukum sebanyak 101 (seratus satu) layanan.

Berikut adalah data Pelayanan dari Posbakum

Satuan Kerja	Jenis Layanan		
	Pemberian Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi dan Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Sangatta	310	105	104

Table 18. Data Pelayanan Posbakum

Untuk Pagu dan Realisasi untuk Posbakum dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Pagu	Realisasi		Sisa	
	Rp	%	Rp	%
28.000.000	26.863.200	95,94	1.136.800	4,06

Table 19. Pagu dan Realisasi untuk Posbakum



Foto Monev Posbakum Oleh Hakim Pengawas Hukum dan Panmud Hukum

### — Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Sangatta belum pernah melaksanakan sidang keliling/ pelayanan terpadu. Persidangan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Sangatta baik secara langsung maupun secara video conference. Dan dalam DIPA Pengadilan Negeri Sangatta tahun anggaran 2025 tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.

Pagu dan Realisasi Anggaran Untuk Sidang Keliling dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Pagu	Realisasi		Sisa	
	Rp	%	Rp	%
0	0	0	0	0

Table 20. Pagu dan Realisasi untuk Sidang Keliling

### — Perkara Prodeo /Pembebasan Biaya Perkara

Dalam DIPA Pengadilan Negeri Sangatta terdapat anggaran untuk perkara peradilan yang diselesaikan di tingkat pertama melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah adanya revisi program nasional maka Pengadilan Negeri Sangatta mengadakan revisi sesuai dengan realisasi yaitu dengan pagu sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) perkara. Dan 1 (satu) perkara tersebut sudah terealisasi dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Sgt.

Pagu	Realisasi		Sisa	
	Rp	%	Rp	%
190.000	190.000	100	0	0

Table 21. Pagu dan Realisasi Perkara Prodeo



## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/  
PENDIDIKAN



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Sangatta per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari Hakim, Pegawai, PPPK dan PPNPN yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	9
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Kepala Sub Bagian	3
8	Panitera Pengganti	1
9	Jurusita	-
10	Jurusita Pengganti	3



11	Pranata Komputer	1
12	Arsiparis	1
13	Pelaksana	6
14	PPPK	6
15	PPNPN	1
<b>Total</b>		<b>38</b>

Table 22. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Sangatta per tanggal 31 Desember 2025

Berikut rekapitulasi data pendidikan hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	4
2	D3	6
3	Strata 1	20
4	Strata 2	7
<b>Total</b>		<b>37</b>

Table 23. Rekapitulasi data pendidikan hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta

Dan untuk data kepangkatan/golongan ruang pada Hakim dan Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	3
3	Penata Tk. I (III/d)	3
4	Penata (III/c)	3
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
6	Penata Muda (III/a)	12
5	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7	Pengatur (II/c)	4
8	Golongan IX	1
9	Golongan VII	1
10.	Golongan V	4
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>

Table 24. data kepangkatan / golongan ruang pada Hakim dan Pegawai

No	Nama	Jabatan
1	Abidin Noor, A.Md	Pramubakti / staf umum dan keuangan
2	Herni	Pramubakti / staf kepegawaian
3	Penky Padli	Satpam / staf umum dan keuangan
4	Muhammad Syahrur, S.H	Supir / staf pidana
5	Sumardi	Supir / staf hukum
6	Desy Wulandari, S.E	Pramubakti / staf PTIP
7	Hardiyanto	Satpam / staf umum dan keuangan

Table 25. Data PPNPN yang dibiayai DIPA sampai dengan bulan Agustus 2025

No	Nama	Jabatan
1	Desy Wulandari, S.E	Pramubakti / staf PTIP

Table 26. Data PPNPN yang dibiayai DIPA sampai dengan bulan Desember 2025

## A. MUTASI

Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya. Dengan kata lain tujuan mutasi untuk menempatkan orang yang tepat ditempat yang tepat (*the right men in the right place*). Data mutasi pegawai Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2025 sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jabatan		Satker		Tanggal	Ket
		Lama	Baru	Lama	Baru		
1	Agnes Maela Nabin, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Banjarmasin	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
2	Cindy Daniela Lamandasa, S.H., M.Kn	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Palu	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
3	Jide Jed Zauzi Hardi Fadillah, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Kepanjen	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
4	Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Balikpapan	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk

5	I Wayan Suredana Putera, S.H., M.H	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Lamongan	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
6	Dina Mardiana, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Ciamis	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
7	Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Hakim Pratama	PN. Serang	PN. Sangatta	13-06-2025	Masuk
8	Mulyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Panitera	PN. Samarinda	PN. Sangatta	23-08-2025	Masuk
9	Christina Simanullang, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	PN. Kuala Kapuas	PN. Sangatta	13-10-2025	Masuk
10	Nia Putriyana, S.H., M.Hum.	Hakim	Hakim	PN. Sangatta	PN. Prabumulih	06-08-2025	Keluar
11	Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.	Hakim	Hakim	PN. Sangatta	PN. Sumbawa Besar	06-08-2025	Keluar
12	Dhimas Tetuko Kusumo, S.H	Hakim	Hakim	PN. Sangatta	PN. Penajam	06-08-2025	Keluar
13	Rizky Aulia Cahyadi, S.H.	Hakim	Hakim	PN. Sangatta	PN. Tanjung	06-08-2025	Keluar
14	Warta Trilaksana, S.H.	Hakim	Hakim	PN. Sangatta	PN. Tanjung Selor	06-08-2025	Keluar
15	Asmin Simamora, S.Sos., S.H.	Panitera	Panitera Pengganti	PN. Sangatta	PT. Kalimantan Timur	17-09-2025	Keluar
16	Henu Sista Aditya, S.H., M.H.	Ketua	Wakil Ketua	PN. Sangatta	PN. Bulukumba	07-11-2025	Keluar

Table 27. Data mutasi pegawai Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2025

## B. PROMOSI

Promosi adalah kenaikan pangkat. Dalam konteks dunia kerja, promosi bisa diartikan bentuk penghargaan berupa kenaikan jabatan ke posisi yang lebih tinggi dan promosi untuk tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada (Nihil).

No	Nama	NIP	Jabatan		Keterangan
			Lama	Baru	
NIHIL					



Table 28. Promosi untuk tahun 2025

### C. PENSIUN

Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai balas jasa terhadap Aparatur Sipil Negara yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai karena sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), atau atas permintaan sendiri (Pensiun Dini) atau karena meninggal dunia.



Pegawai Negeri yang memasuki masa pensiun untuk tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada (Nihil).

No	Nama Pegawai	Jabatan	SK Pensiun Janda / Duda	Keterangan
NIHIL				

Table 29. Data Pensiun Pegawai Tahun 2025

### D. DIKLAT

Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sangatta telah mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi SDM Teknis maupun SDM Non Teknis baik secara online maupun secara offline yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Lama Diklat	Tempat Diklat	Keterangan	Penyelenggara
1	Muhammad Abiyyu Arhab, S.H	Analisis Perkara Peradilan	19-27 Maret 2025	BSDK MA RI	Mengikuti Latsar	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
2	Norain Bumbungan, S.H	Analisis Perkara Peradilan	19-27 Maret 2025	BSDK MA RI	Mengikuti Latsar	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan

						Hukum Dan Peradilan Umum
3	Ricardo Ginting, S.H	Analisis Perkara Peradilan	19-27 Maret 2025	BSDK MA RI	Mengikuti Latsar	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
4	Malikhatun Nafiah, A.Md.Kom	Dokumental is Hukum	14 Juli s/d 11 November 2025	PN. Sangatta	Mengikuti Latsar secara Distance Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
5	Stephanus Martua Turnip, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana	14 Juli s/d 28 Oktober 2025	PN. Sangatta	Mengikuti Latsar secara Distance Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
6	Owen Pramana Sakti, A.Md	Dokumental is Hukum	14 Juli s/d 04 November 2025	PN. Sangatta	Mengikuti Latsar secara Distance Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
7	Muhamad Rodansa, S.I.P	Kasub Umum & Keuangan	06 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan PBJ model MOOC secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
8	Aisyah, S.H.,M.H	Kasub PTIP	20 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan PBJ model MOOC secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
9	Ruslinda, A.Md.,S.Pd.,S.H	Kasub Kepegawaian dan Ortala	20 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan PBJ model MOOC secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
10	Revando Lumban Raja, S.Komp	Pranata Komputer Ahli Pertama	20 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan PBJ model MOOC secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan



11	Yunita, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	20 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan PBJ model MOOC secara E-Learning	Umum Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan Umum
12	I Wayan Suredana Putra, S.H.,M.H	Hakim	2-27 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Seluruh Indonesia secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan Umum
13	Uzan Purwadi, S.H.,M.H	Wakil Ketua	22-26 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan Umum
14	Wening Indradi, S.H.,M.Kn	Hakim	22-26 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan Umum
15	Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.	Hakim	22-26 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan Umum
16	Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H.	Hakim	22-26 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Peradilan

					Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Umum
17	Jide Jed Zauzi Hardi Fadillah, S.H.	Hakim	22-26 September 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
18	I Wayan Suredana Putera, S.H.,M.H	Hakim	06-10 Oktober 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
19	Dina Mardiana, S.H	Hakim	06-10 Oktober 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
20	Agnes Maela Nabin, S.H	Hakim	06-10 Oktober 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
21	Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H	Hakim	06-10 Oktober 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum

					secara E-Learning	
22	Cindy Daniela Lamandasa, S.H.,M.Kn	Hakim	06-10 Oktober 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
23	I Wayan Suredana Putera, S.H.,M.H	Hakim	17-21 November 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
24	Agnes Maela Nabin, S.H	Hakim	01-05 Desember 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
25	Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H	Hakim	01-05 Desember 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum
26	Jide Jed Zauzi Hardi Fadillah, S.H.	Hakim	01-05 Desember 2025	PN. Sangatta	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum secara E-Learning	Badan Strategi Kebijakan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Umum

Table 30. bimtek bagi SDM Teknis maupun Non Teknis baik secara online maupun secara offline





10 NOVEMBER 2025

### Partisipasi Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta dalam Uji Kompetensi Penguasaan Barang/Jasa



## BAB IV

# PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta tertuang dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 01 dan DIPA 03, dimana DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005-01.2.662986/2025 tertanggal 02 Desember 2024 terdapat anggaran sebesar Rp5.689.582.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dan untuk DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum) dengan nomor DIPA : SP DIPA-005-03-2.662987/2025 tertanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp150.034.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Untuk realisasi belanja pegawai dan belanja operasional kantor untuk DIPA 01 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Pegawai	4.509.928.000	4.457.144.265	98,83	52.783.735
2	Belanja Barang Operasional	1.178.654.000	1.170.575.447	99,31	8.078.553
3	Belanja Barang Non Operasional	700.000	650.000	92,86	50.000
4	Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah		5.689.282.000	5.628.669.712	98.93	60.912.288

Table 31. Realisasi belanja pegawai dan belanja operasional kantor untuk DIPA 01 tahun 2025



Sedangkan realisasi belanja untuk DIPA 03 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa
		Rp	Rp		Rp
1	Percepatan penyelesaian perkara (KIMWASMAT)	3.150.000	3.120.000	99,05	30.000
2	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama wilayah tengah	118.694.000	118.542.000	99,87	152.000
3	Layanan Posbankum	28.000.000	26.863.200	95,94	1.136.800
4	Pembebasan biaya perkara ( Prodeo )	190.000	190.000	100	0
<b>Jumlah</b>		<b>150.034.000</b>	<b>148.715.200</b>	<b>99,12</b>	<b>1.318.800</b>

Table 32. Realisasi belanja untuk DIPA 03

Dalam tahun anggaran 2025 terjadi beberapa kali revisi baik dari DIPA 01 maupun dari DIPA 03, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	DIPA 01			
	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Pagu awal	Pagu setelah revisi
1	Revisi DIPA ke-1	14 Januari 2025	4.449.049.000	4.449.049.000
2	Revisi DIPA ke-2	23 Februari 2025	4.449.049.000	4.449.049.000
3	Revisi DIPA ke-3	23 Maret 2025	4.449.049.000	4.449.049.000
4	Revisi DIPA ke-4	11 April 2025	4.449.049.000	4.449.049.000
5	Revisi DIPA ke-5	22 Mei 2025	4.449.049.000	5.306.329.000
6	Revisi DIPA ke-6	10 Juli 2025	5.306.329.000	5.306.329.000
7	Revisi DIPA ke-7	26 Agustus 2025	5.306.329.000	5.306.329.000
8	Revisi DIPA ke-8	01 Oktober 2025	5.306.329.000	5.487.656.000
9	Revisi DIPA ke-9	24 Oktober 2025	5.487.656.000	5.454.356.000
10	Revisi DIPA ke-10	14 November 2025	5.454.356.000	5.689.582.000
11	Revisi DIPA ke-11	28 November 2025	5.689.582.000	5.689.582.000

Table 33. Revisi DIPA 01

No	DIPA 03			
	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Pagu awal	Pagu setelah revisi
1	Revisi DIPA ke-1	22 Februari 2025	156.054.000	156.054.000
2	Revisi DIPA ke-2	21 Maret 2025	156.054.000	156.054.000
3	Revisi DIPA ke-3	17 Juni 2025	156.054.000	156.054.000
4	Revisi DIPA ke-4	27 Agustus 2025	156.054.000	156.054.000
5	Revisi DIPA ke-5	24 Oktober 2025	156.054.000	150.204.000
6	Revisi DIPA ke-6	08 November 2025	150.204.000	150.034.000

Table 34. Revisi DIPA 03

### Rekapitulasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025

No	MAP	Jenis PNBP	Penerimaan	Yang disetor
1	425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	170.000	170.000
2	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah Panitera pada badan peradilan	2.410.000	2.410.000
3	425233	Pendapatan ongkos perkara	9.390.000	9.390.000
4	425239	Pendapatan kejaksaan dan badan peradilan lainnya	24.878.500	24.878.500
5	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi	24.690.440	24.690.440
6	425122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	1.359.000	1.359.000
5	425231	Sewa tanah gedung dan bangunan	979.500	979.500
<b>TOTAL</b>			<b>63.877.440</b>	<b>63.877.440</b>

Table 35. Rekapitulasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025

Berikut kami sampaikan juga data keuangan perkara

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 2025
1	Biaya Perkara	78.511.000	413.232.701	450.159.801	41.623.900
2	ATK	0	22.050.000	22.050.000	0
3	Konsinyasi	1.711.573.535	0	444.767.000	1.266.806.535
4	Eksekusi	46.863.500	57.962.000	62.516.000	42.309.500

Table 36. Data Keuangan Perkara

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat seperti di bawah ini :

### 1. Tanah

No	Lokasi	Luas	Keterangan
1	Jl. Prof. Dr. Wirdjono.P, S.H No. 1 Perkantoran Bukit Pelangi.	9.245 M <sup>2</sup>	Tanah gedung kantor Pengadilan Negeri Sangatta
2	Jl. Soekarno Hatta Perumahan Dewa Ruci.	700 M <sup>2</sup>	Tanah dan bangunan rumah dinas Pengadilan Negeri Sangatta

Table 37. Tanah Pada Pengadilan Negeri Sangatta

### 2. Gedung dan Bangunan

No	Nama/Type Gedung Bangunan	Luas	Alamat	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sangatta	1.351 M <sup>2</sup>	Jl. Prof. Dr. Wir djono.P, S.H No. 1 Perkantoran Bukit Pelangi.	√			Gedung belum Prototype

Table 38. Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sangatta

### 3. Rumah Dinas

No	Uraian	Type	Jumlah	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah dinas Ketua	Type C	1	☑ √			Pinjam pakai dari PemKab Kutai Timur



2	Rumah dinas Wakil Ketua	Golongan I Type C Permanen	1	√			
3	Rumah dinas Hakim	Golongan I Type C Permanen	6	√			
4	Rumah dinas Panitera	Golongan I Type C Permanen	1	√			
5	Rumah dinas Sekrearis		0				Sekretaris belum memiliki rumah dinas

Table 39. Rumah Dinas

4. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan dinas roda 4					
1	Kijang Super	2004	√			
2	Kijang Inova	2010	√			
3	Kijang Inova	2011	√			
4	Fourtune	2017	√			Pinjam Pakai dari Pemkab Kutim
5	Fortune	2025	√			Pinjam Pakai dari Pemkab Kutim
II	Kendaraan dinas roda 2					
1	Yamaha Jupiter Z	2008	√			
2	Yamaha Jupiter Z	2008	√			
3	Yamaha Scorvio	2008	√			
4	Yamaha JupiterMX	2005	√			
5	Yamaha JupiterMX	2005	√			
6	Yamaha Vega R	2004	√			

Table 40. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2



Tiga Kendaraan sepeda motor dengan kondisi rusak berat sudah dilakukan penghapusan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 884/SEK/SK.PL.1.2.3/III/2025 Tentang Penghapusan BARang Milik Negara/ Kekayaan Negara Selain Tanah Dan Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Sangatta.

Daftar Barang Milik Negara Yang disetujui Untuk Dihapus Pada Pengadilan Negeri Sangatta

No	Nama Barang	Merk/Type	Kode Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sepeda Motor	Yamaha Vega R	3020104001	1	2004	1	5.700.000	1.349.000	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	Yamaha Vega R	3020104001	2	2004	1	5.700.000		Rusak Berat
3	Sepeda Motor	Yamaha Vega R	3020104001	3	2004	1	5.700.000		Rusak Berat
Jumlah						3	17.100.000	1.349.000	

Table 41. Daftar Barang Milik Negara Yang disetujui Dihapus Pada Pengadilan Negeri Sangatta

## 5. Ruangan

No	Ruangan	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Panitera Muda Pidana	1
7	Ruang Panitera Muda Perdata	1
8	Ruang Panitera Muda Hukum	1
9	Ruang Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1
12	Ruang persediaan alat rumah tangga	0
13	Ruang Sidang	3

14	Ruang Mediasi, Diversi dan Perpustakaan	1
15	Ruang Arsip	2
16	Ruang Server	1
17	Ruang Posbakum	1
18	Ruang Bapas dan Peksos	0
19	Ruang Laktasi dan kesehatan	1
20	Ruang Jaksa	0
21	Ruang Tahanan (Laki-laki dan Perempuan)	2
22	Ruang Tahanan Anak	0
23	Ruang Tamu Terbuka	1
24	Ruang Kamar Mandi Umum	2
25	Ruang Kamar Mandi Tahanan	1
26	Ruang Kamar Mandi Disabilitas	1
27	Ruang Barang Bukti	0
28	Ruang Gudang	2
29	Ruang PTSP	1
30	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	0

Table 42. Ruangan Pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sangatta

## 6. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	PC	30	Baik
2	Laptop	28	Baik
3	Printer	38	Baik
4	AC	29	Baik
5	Scaner	7	Baik
6	Genset	1	Baik
7	UPS	5	Baik
8	Rak Server	1	Baik
9	Pesawat Telephone	11	Baik
10	Faximile	2	Baik

11	Receiver	1	Baik
12	LAN	1	Baik
13	Router	1	Baik
14	LCD Monitor	2	Baik
15	Sound System	2	Baik
16	Handy Cam	1	Baik
17	Portable water pump	1	Baik
18	Audio Mixing Console	2	Baik
19	Microphone	7	Baik
20	Kipas angin	8	Baik

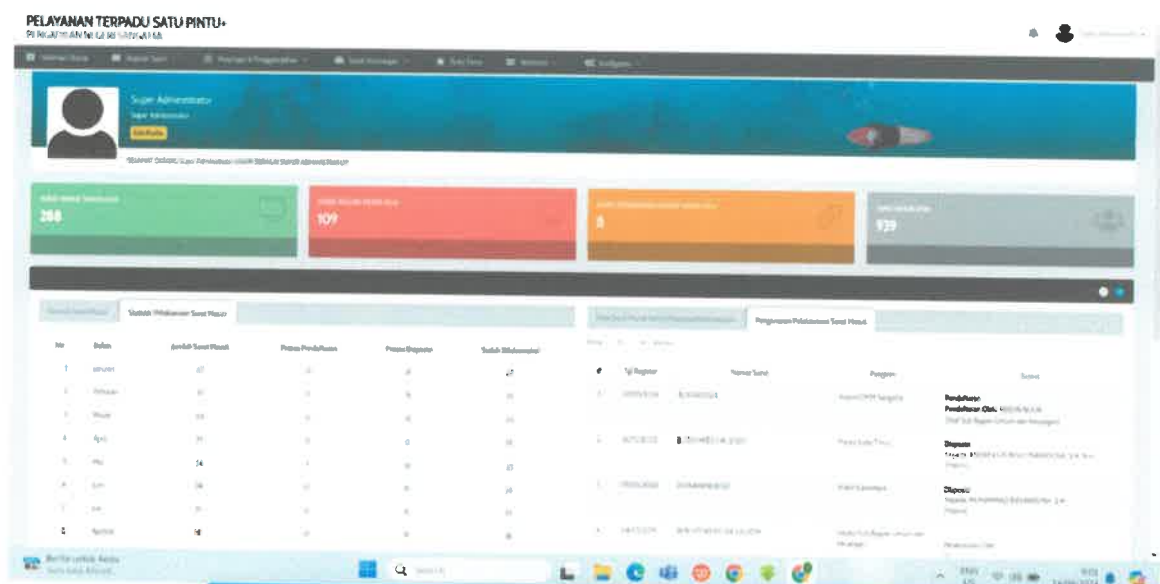
Table 43. Peralatan dan Mesin

### Pengadaan Sarana dan Prasarana

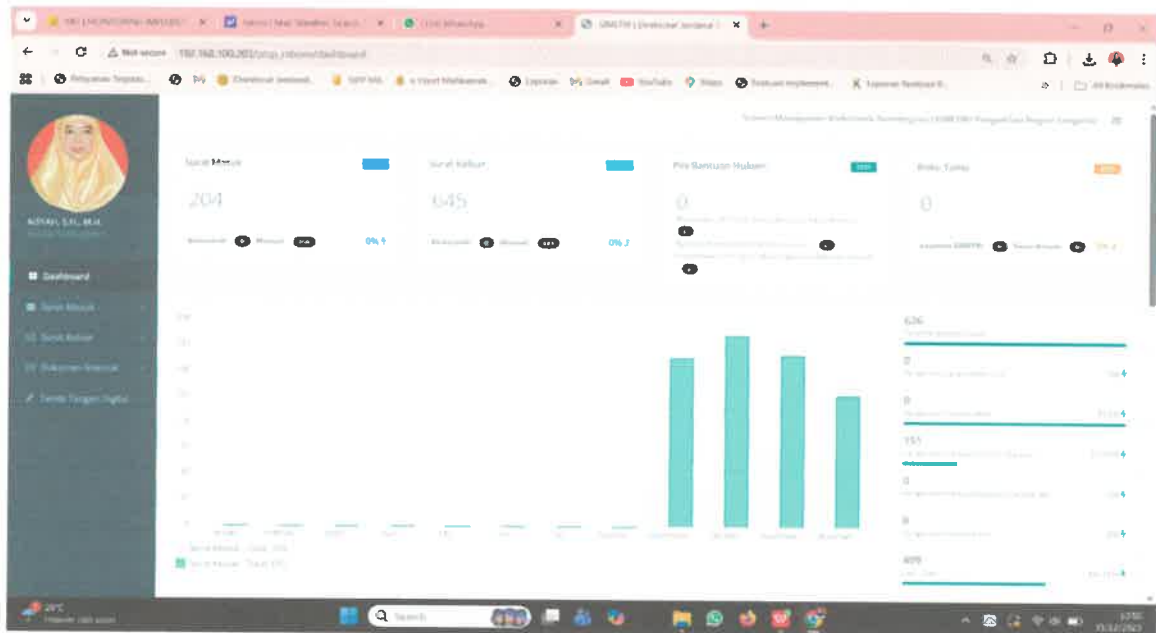
Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun anggaran 2025 tidak mendapat anggaran berupa belanja modal.

### Register Surat Masuk dan Surat Keluar

Pengadilan Negeri Sangatta dari Januari sampai dengan bulan Agustus pertengahan masih menggunakan PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) untuk register surat masuk dan keluar, buku tamu, surat keterangan. Tampilan aplikasi PTSP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Setelah ada pembaharuan aplikasi PTSP+ berganti menjadi SIMETRI maka tampilannya seperti gambar di bawah ini :



Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	32	189
Februari	31	1226
Maret	32	172
April	27	128
Mei	31	175
Juni	31	130
Juli	38	217
Agustus	17	143
September	32	164
Oktober	31	186
November	79	167
Desember	62	129
Jumlah	443	1.916

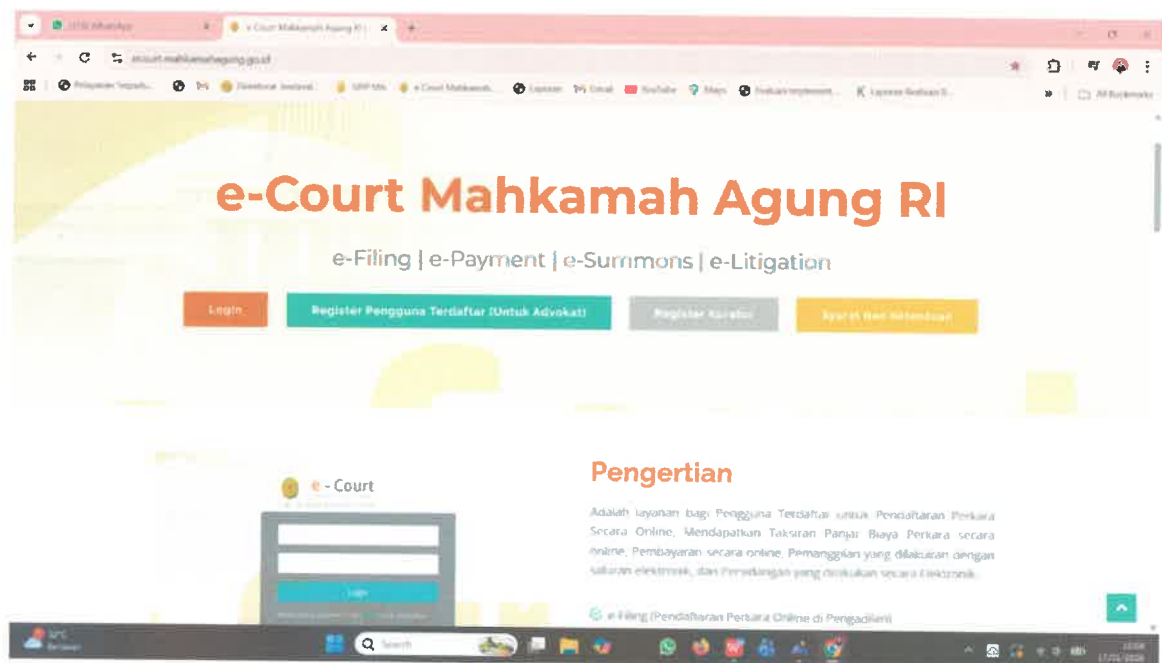
Table 44. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Pengadilan Negeri Sangatta



## C. Pengelolaan Teknologi Informasi

### Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran gugatan atau permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik (e-Summons). Aplikasi e-Court terhubung dengan aplikasi SIPP dalam hal pendaftaran perkara.



Pada Pengadilan Negeri Sangatta pendaftaran perkara melalui e-Court dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Gugatan	64
2	Bantahan	0
3	Gugatan Sederhana	4
4	Permohonan	128
Jumlah		196

Table 45. Pendaftaran perkara melalui e-Court

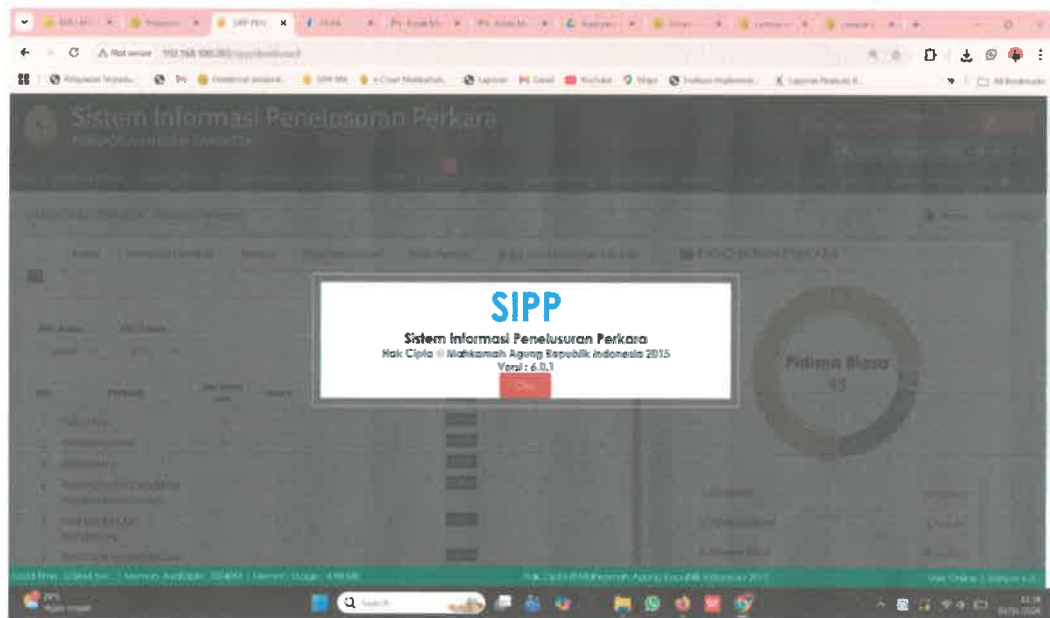
Pendaftaran Upaya Hukum dan Eksekusi melalui E-Court dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bulan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
Januari	0	0	0	0
Februari	1	0	2	0
Maret	3	2	1	0
April	0	1	0	0
Mei	0	0	0	2
Juni	2	0	3	0
Juli	0	0	0	0
Agustus	4	1	2	0
September	0	0	2	1
Oktober	1	3	0	0
November	0	0	1	0
Desember	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

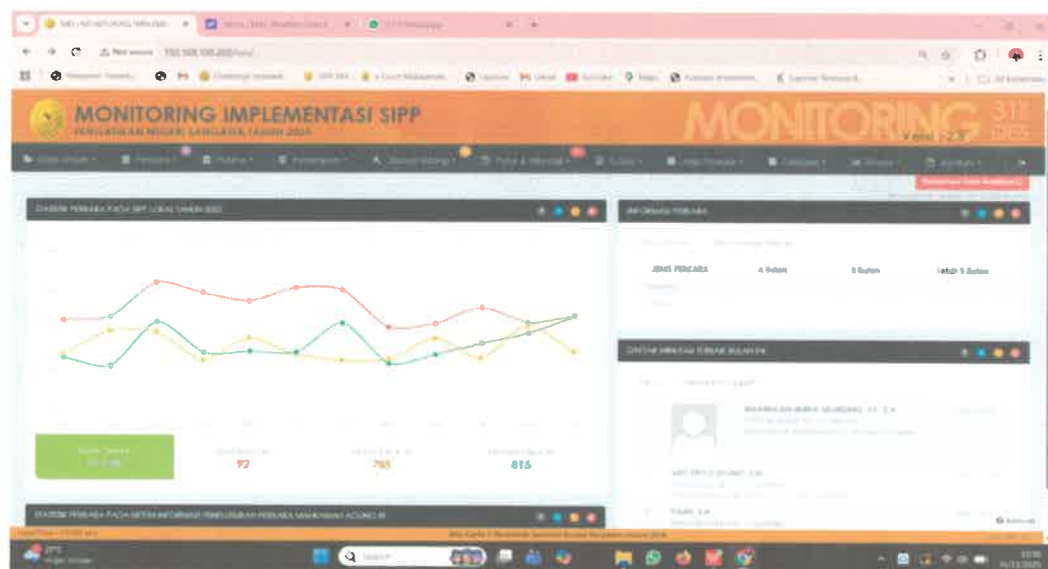
Table 46. Pendaftaran Upaya Hukum dan Eksekusi melalui E-Court

### Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web untuk memberikan informasi yang terkait proses penanganan perkara, misalnya pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapan pun dan dimanapun dengan mudah dan cepat, sehingga untuk penyajian informasi tentang administrasi perkara dapat mudah didapat untuk bahan monitoring dan evaluasi. Saat ini Pengadilan Negeri Sangatta telah menggunakan SIPP versi terakhir yaitu versi 6.0.1



Selain itu aplikasi MIS difungsikan pimpinan pengadilan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan sebagai termasuk bagian dari pengawasan. Berdasarkan data statistik SIPP lokal prosentase penanganan perkara pada SIPP lokal telah mencapai **92,93 %** per 31 Desember 2025.

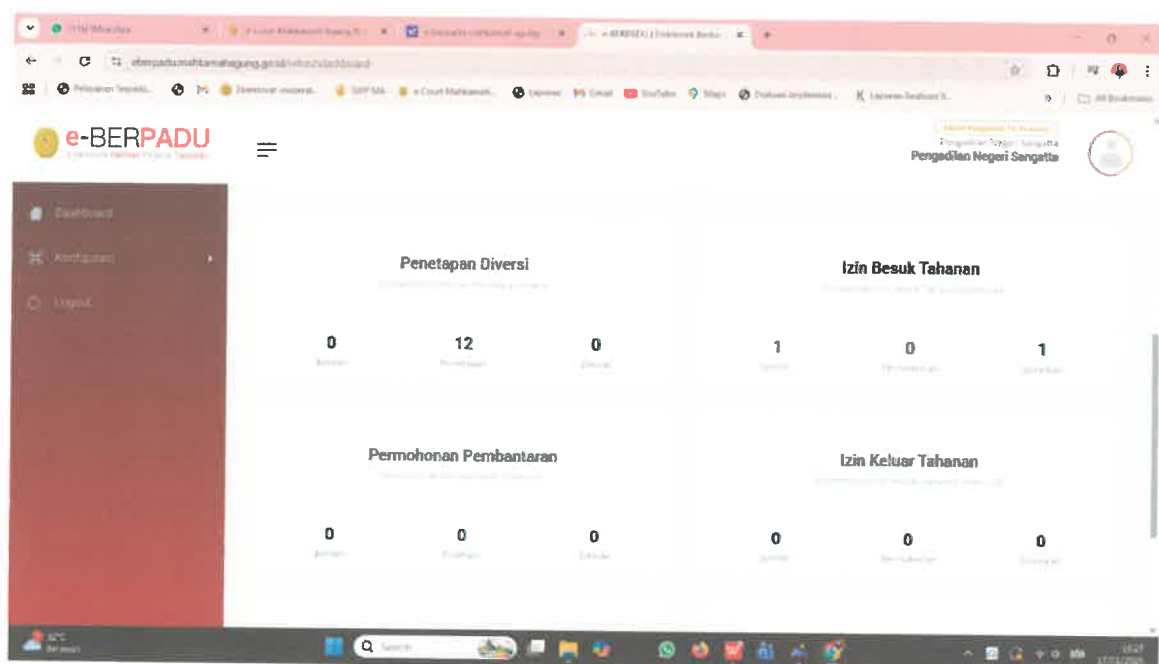
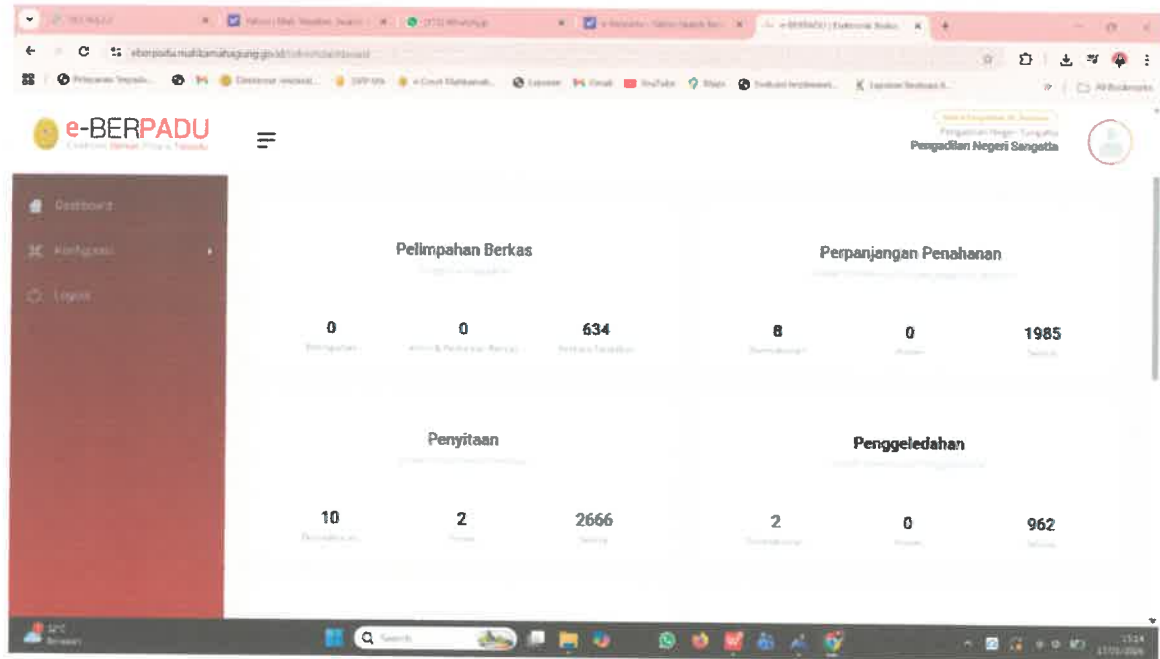


### Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta

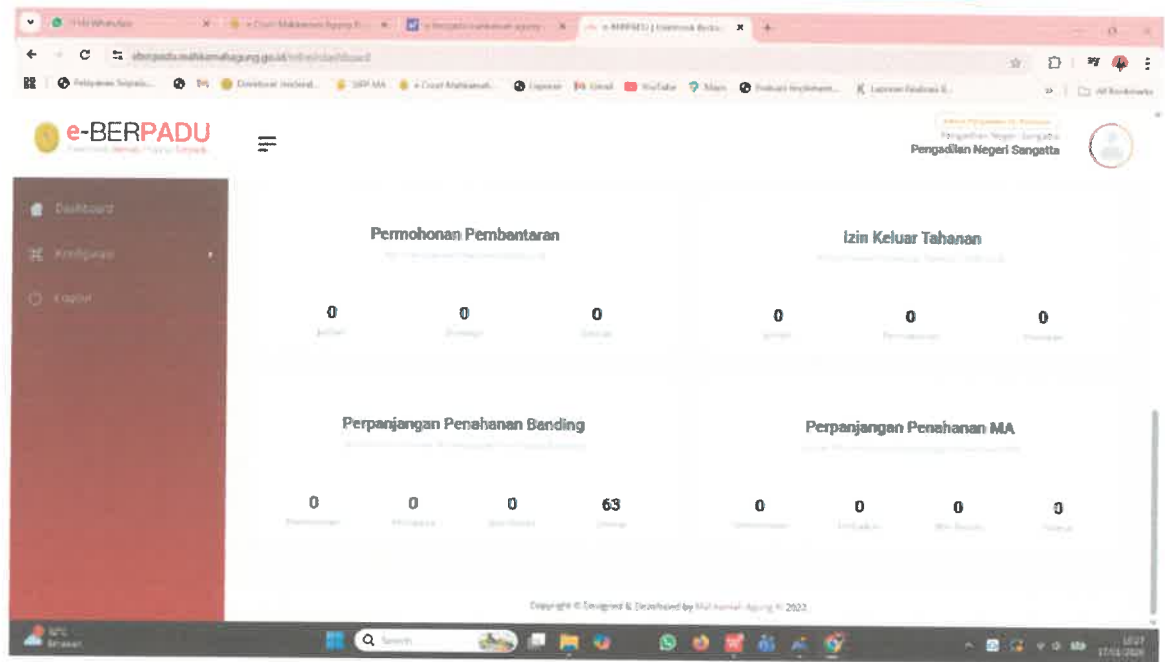
e-Berpadu adalah singkatan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu, sebuah aplikasi berbasis web dari Mahkamah Agung RI yang mengintegrasikan administrasi perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK,

Ditjen PAS) untuk mempercepat, menyederhanakan, dan menghemat biaya proses pidana melalui digitalisasi dokumen. Fiturnya mencakup pelimpahan berkas, permohonan izin (penggeledahan, penyitaan, besuk tahanan), perpanjangan penahanan, penangguhan, hingga pendaftaran praperadilan elektronik, dengan fitur izin besuk yang bisa diakses langsung oleh masyarakat umum.

Berikut keadaan perkara E-Berpadu berdasarkan dasbord E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Sangatta:







## BAB V

# PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK

### A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Pengadilan di Indonesia merupakan instrumen rutin yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan secara objektif dan berkesinambungan. Mahkamah Agung telah menetapkan indeks kepuasan pengguna sebagai salah satu Indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029.

Point penting Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan:

1. Dasar Hukum dan Tujuan  
Berdasarkan Peraturan MenPan-RB No 14 Tahun 2017, Survey ini mengukur kinerja Pelayanan sebagai bagian dari sasaran strategis Mahkamah Agung
2. Responden  
Masyarakat Pengguna Layanan , Termasuk pencari Keadilan, Penasihat Hukum, Jaksa, Dan Polisi
3. Unsur Yang Dinilai  
Meliputi persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Dan Penanganan Pengaduan.

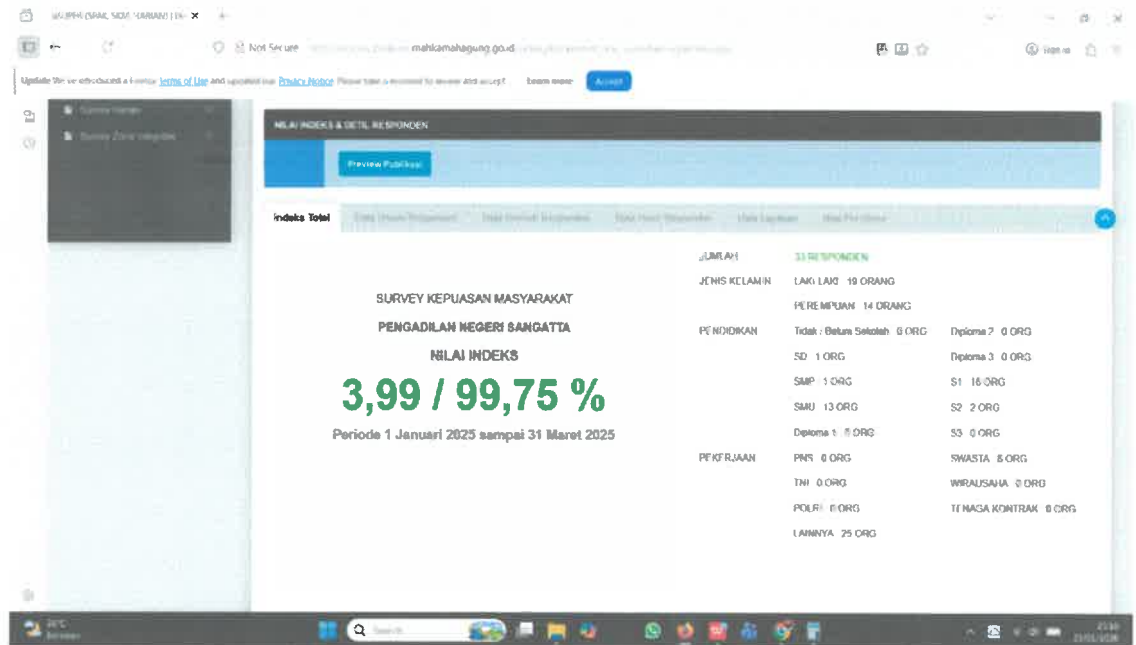
Kategori Mutu Pelayanan

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| a. A (Sangat Baik) | : 88,31- 100,00 |
| b. B (Baik)        | : 76,61- 88,30  |
| c. C (Kurang Baik) | : 65,00- 76,60  |
| d. D (Tidak Baik)  | : 25,00- 64,99  |

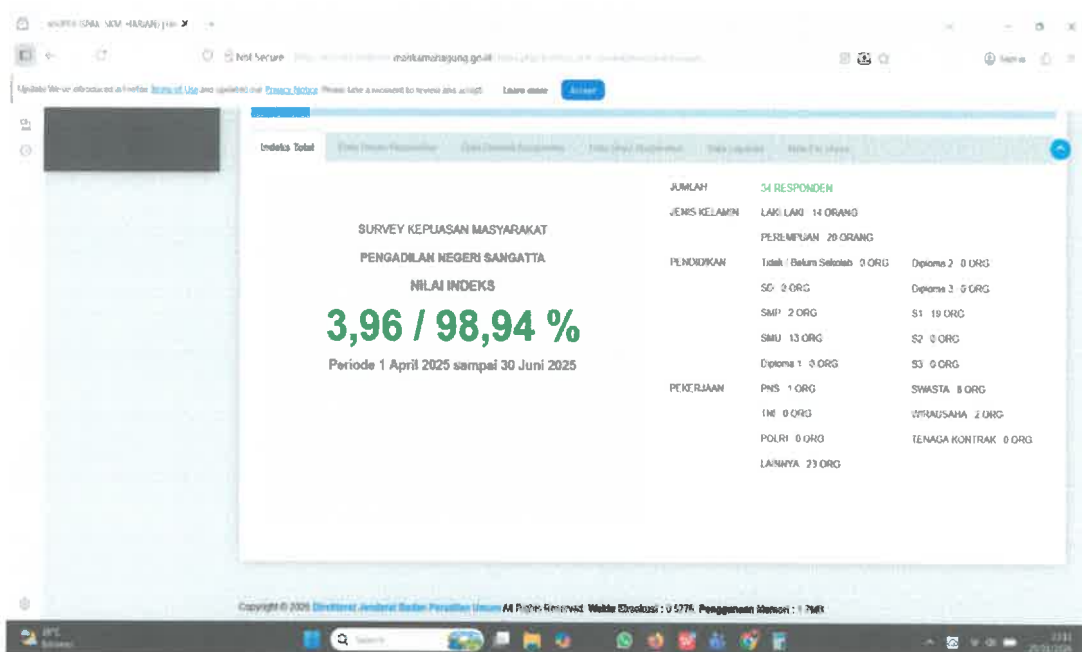
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka (input/saran).

Survei ini dilakukan diberbagai tingkat Pengadilan (Pengadilan Negeri, Tinggi, Agama, TUN, Militer) secara berkala (triwulan/tahunan) untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan.

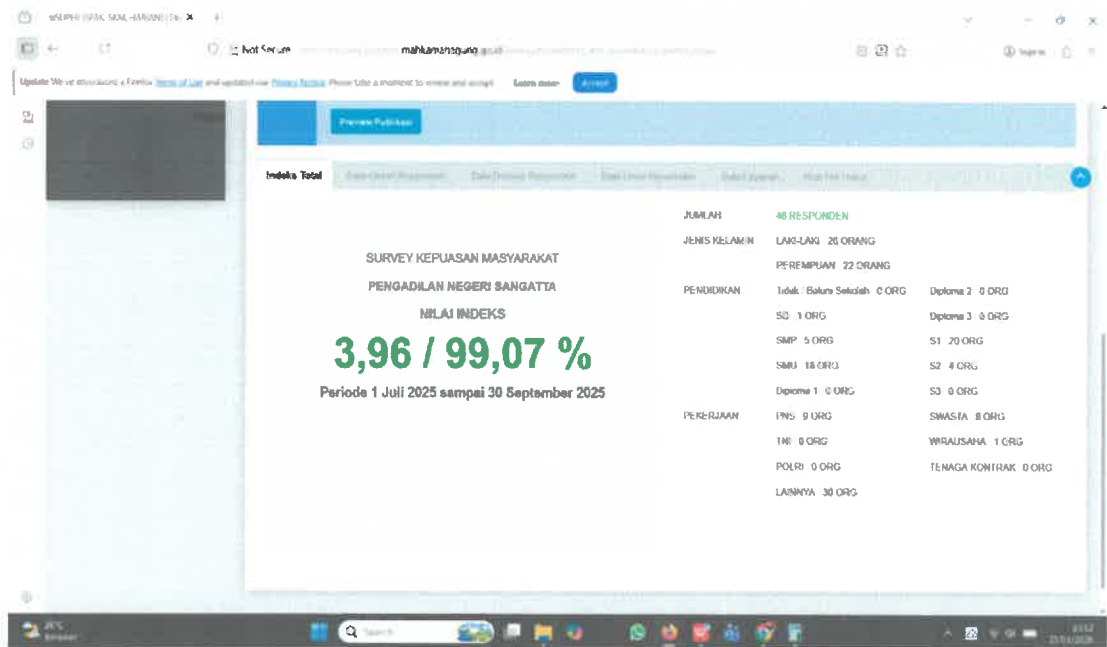
Indeks Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Sangatta pada periode bulan **Januari - Maret 2025 (Triwulan I)** mencapai nilai **3,99 / 99,75%** seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



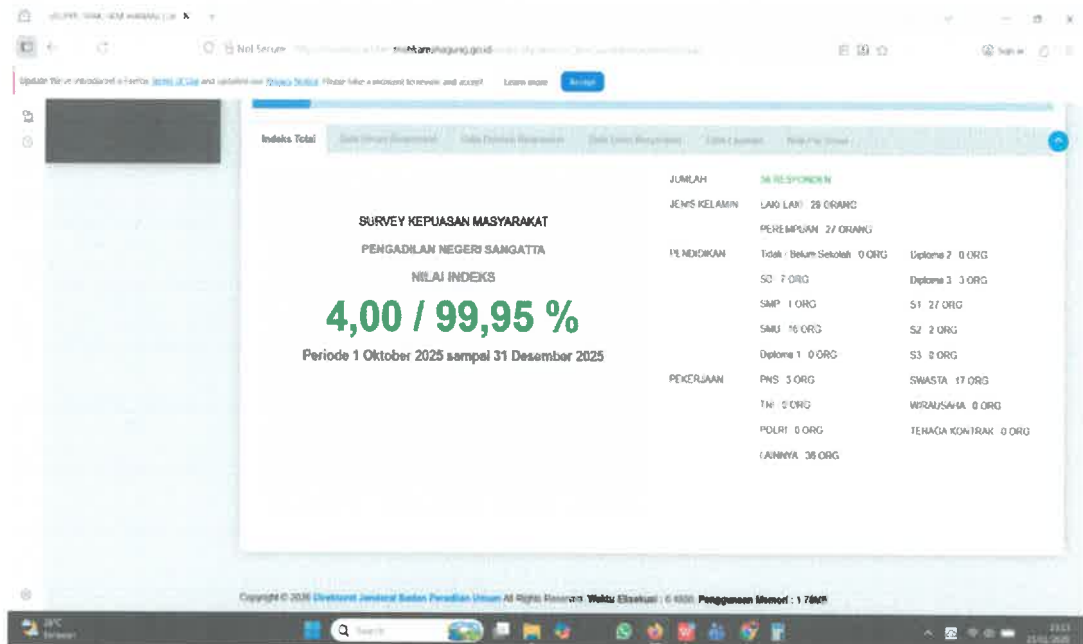
Indeks Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Sangatta pada periode bulan **April- Juni 2025 ( Triwulan II)** mencapai nilai **3,96 / 98,94%** seperti terlihat pada gambar dibawah ini



Indeks Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Sangatta pada periode bulan **Juli- September 2025 (Triwulan III)** mencapai nilai **3,96 / 99,07%** seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Dan untuk Indeks Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri Sangatta pada periode bulan **Oktober - Desember 2025 (Triwulan III)** mencapai nilai **4,00/ 99,95%** seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Semua laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi sudah diupload di website Pengadilan Negeri Sangatta, Beserta Laporan Tindak Lanjut atas nilai terendah pada survei tersebut.



## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Sangatta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

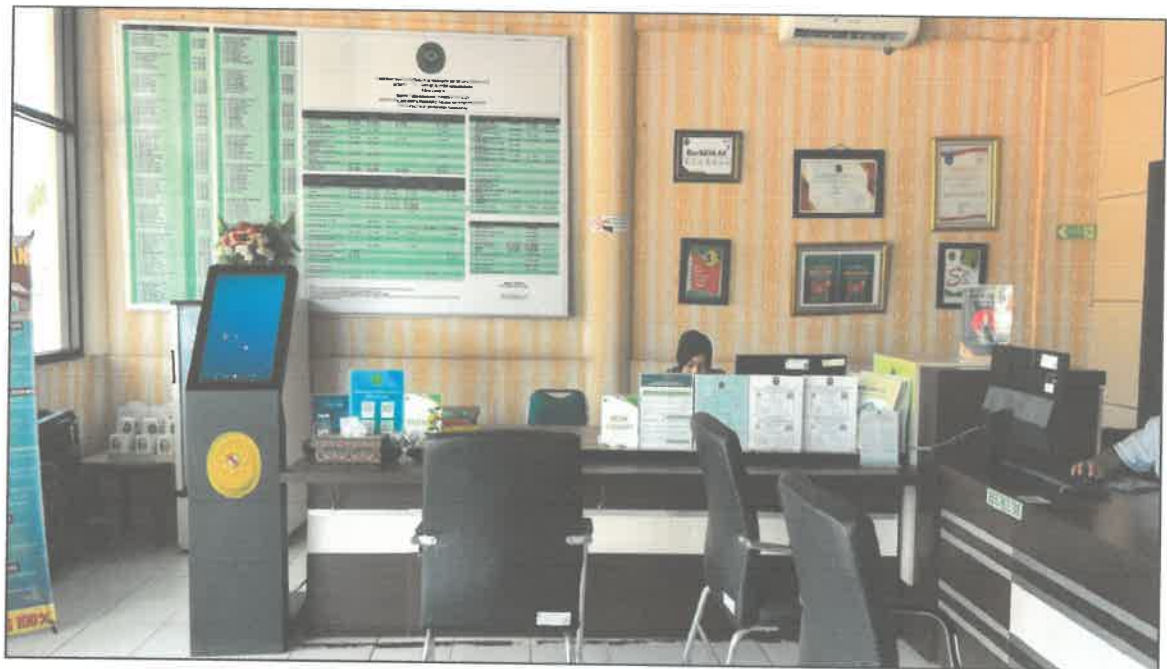
Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan- kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelayanan pada PTSP terdapat 4 meja pelayanan yaitu

- 1) Meja Pidana
- 2) Meja Perdata
- 3) Meja Hukum Pengaduan dan Informasi
- 4) Meja Umum



Selain itu terdapat pojok e-Court.



Di ruang PTSP telah disiapkan kursi prioritas untuk Lansia, Ibu hamil dan menyusui, dan untuk penyandang disabilitas. Khusus penyandang disabilitas telah disiapkan juga area parkir, jalur disabilitas, kursi roda, tongkat penyangga dan seorang yang bertugas untuk membimbing penyandang disabilitas tersebut untuk mendapatkan pelayanan pada meja PTSP.

Di meja PTSP juga telah tersedia buku *braille* untuk disabilitas dimana dalam buku tersebut berisi tentang apa saja layanan dalam PTSP Pengadilan Negeri. Setelah pengunjung mendapatkan pelayanan, pengunjung diarahkan untuk mengisi survey yang akan dipandu oleh petugas yang ada. Survey tersebut bertujuan sebagai tolak ukur bagi kita sampai sejauh mana kepuasan pengunjung dalam pelayanan yang telah kita berikan.

Fasilitas lainnya yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra yaitu adanya *Guiding Block* yang dipasang di berbagai area dari depan pintu PTSP menuju ke ruang sidang.







Pengadilan Negeri Sangatta juga menyiapkan ruang tamu terbuka bagi tamu yang ingin bertemu dengan Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta, dan ada juga *Co-Working Space* pada ruang tamu terbuka yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk bekerja atau mengetik dokumen atau sekedar mengisi daya baterai hp/laptop/gadget sembari menunggu antrian sidang.





### C. Inovasi Pelayanan Publik

Sebagai instansi yang melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Sangatta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat inovasi baik dari fasilitas yang ada maupun dari pelayanannya. Hal ini tidak lain dari salah satu wujud badan peradilan yang agung, yaitu pengadilan yang berorientasi kepada pelayanan publik yang prima, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan pelayanan yang prima.

Berikut jenis inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Sangatta :

#### 1. Elektronik permohonan salinan putusan (E-PESAN)



Dalam rangka mendukung pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pengadilan Negeri Sangatta meluncurkan platform digital yang dapat mengakomodir Sobat Peradilan dalam mengajukan permohonan salinan putusan/penetapan melalui platform \*E-PESAN (Elektronik- Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta)\*

E-PESAN merupakan inovasi layanan peradilan yang memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas kepada masyarakat/instansi yang ingin mengajukan permohonan salinan putusan/penetapan dengan mekanisme online

Berikut link untuk mengakses E-PESAN : [bit.ly/E-PESAN](https://bit.ly/E-PESAN)

Untuk memudahkan Sobat Peradilan dalam memahami penggunaan E-PESAN, maka berikut ini kami lampirkan link Tutorial Penggunaan E-PESAN :

[bit.ly/TutorialPenggunaanE-PESAN](https://bit.ly/TutorialPenggunaanE-PESAN)

## 2. Layanan Elektronik WhatsApp Bot



Pengadilan Negeri Sangatta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Elektronik WhatsApp Bot, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akses

Cepat. Layanan ini memanfaatkan teknologi WhatsApp auto reply untuk memberikan informasi pelayanan secara mudah dan cepat kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sangatta.

Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi . Layanan Elektronik WhatsApp Bot ini juga dapat membantu mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Layanan ini dapat digunakan dengan mengirim pesan ke nomow whatsapp yang tertera pada gambar di atas.

### 3. E-Brosur



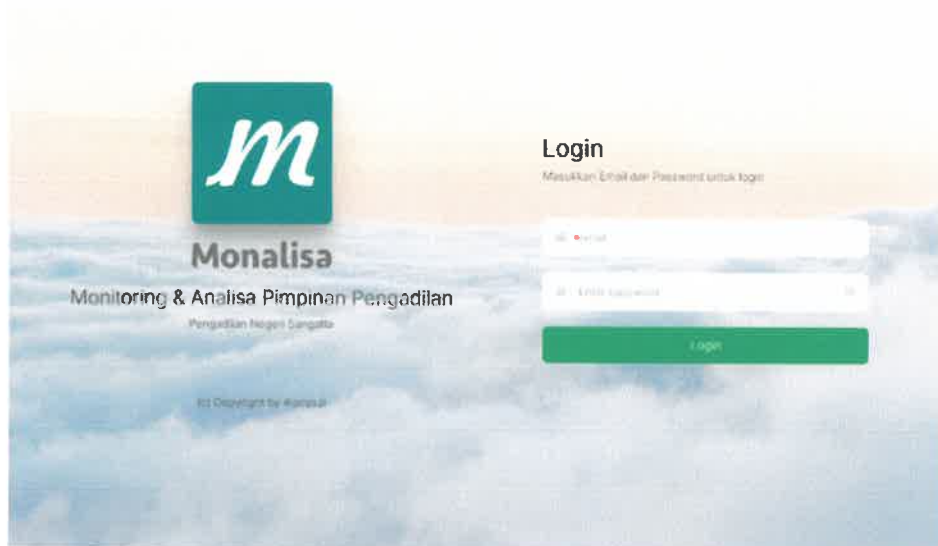
E-brosur adalah Brosur Elektronik Seluruh Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sangatta. Brosur diletakkan pada meja pelayanan PTSP sedangkan E-Brosur pada website pengadilan dapat diakses pada QR Code diatas maupun pada link: <https://web.pn-sangatta.go.id/2021/11/05/e-brosur/>

#### 4. E-Banner



E-Banner adalah Media Informasi berupa Banner Elektronik (Digital) yang ditampilkan pada televisi ruang tunggu Pengunjung Pengadilan. E-Banner berisi informasi mengenai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Prosedur Eraterang, Zona Integritas Pengadilan Negeri Sangatta, dan Layanan PTSP Pengadilan Negeri Sangatta. E-Banner juga dapat dilihat melalui browser dengan klik link berikut: <https://bit.ly/3rY6wMe>

#### 5. Monalisa





Aplikasi MONALISA merupakan inovasi sistem pengawasan digital yang dikembangkan secara khusus oleh Pengadilan Negeri Sangatta untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja penyelesaian perkara secara real-time dengan mengacu pada empat indikator utama Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI, yaitu aspek Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan, dan Kesesuaian. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan mengintegrasikan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mendeteksi adanya ketidaklengkapan administrasi atau keterlambatan input data, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme Early Warning System berupa pengiriman notifikasi peringatan secara langsung ke dalam grup komunikasi internal mengenai detail spesifik tunggakan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Hakim, Panitera, maupun Jurusita Pengganti, sehingga memastikan seluruh proses administrasi perkara berjalan tertib, akurat, dan tepat waktu demi mempertahankan standar mutu pelayanan peradilan yang prima.

# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 377/KPN.W18-U6/PS.04/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025.
2. Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengikuti pembinaan dan pengawasan langsung dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta jajarannya baik yang dilakukan secara langsung (*online*) melalui *zoom meeting* maupun tidak langsung (*offline*).

3. Panitera dan Panitera Muda telah mengikuti monitoring dan evaluasi setiap bulannya yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bersama seluruh Pengadilan Negeri lainnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui video conference.
4. Sekretaris dan Para Kasubbag telah mengikuti monitoring dan evaluasi setiap bulannya yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bersama seluruh Pengadilan Negeri lainnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui video conference.
5. Para Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan pada masing-masing bidang/bagian sesuai dengan SK Ketua setiap minggu dan melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan.
6. Setiap bulan dilaksanakan rapat rutin bulanan yang dipimpin oleh Ketua didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Dalam rapat bulanan tersebut membahas hasil temuan dari hakim pengawas bidang dan juga membahas terkait permasalahan yang terjadi yang tidak dapat diselesaikan pada rapat dalam lingkup yang lebih kecil (misalnya dalam rapat internal kepaniteraan maupun rapat internal kesekretariatan) dan segera dicarikan solusi dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan bidang yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan Pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta dapat menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat ditemukan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang terdapat pada masing-masing bagian tersebut.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sangatta telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dalam hal pengadministrasian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan juga peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara maksimal.

#### **B. Rekomendasi**

1. Oleh karena sarana dan prasarana gedung pengadilan yang belum sesuai standar atau prototype dan masih jauh dari rasa aman dan nyaman, maka perlu diupayakan agar dilakukan renovasi atau pembangunan gedung kantor sesuai dengan prototype, minimal segera dapat dilakukan renovasi gedung kantor sehingga sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sangatta dapat terpenuhi dan sesuai dengan peruntukannya dan tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif;
2. Karena keterbatasan ruang pada gedung pengadilan, maka belum tersedia ruang tahanan Anak, ruang tunggu Anak, ruang Peksos dan Bapas Anak, ruang teleconference, ruang mediasi dan diversi, ruang tahanan perempuan dan pria yang masih kurang layak, toilet tahanan yang kurang layak, toilet pengunjung yang sama peruntukannya dengan toilet pegawai dan belum tersedianya ruang tunggu pengunjung sidang.
3. Menambah kelengkapan sarana layanan bagi penyandang disabilitas seperti kursi prioritas dan toilet disabilitas;



4. Penambahan tenaga teknis kepaniteraan dan staf kesekretariatan yang memiliki kompetensi dan skil di bidangnya masing-masing;
5. Diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terutama pelatihan bagi petugas PTSP dalam melayani penyandang disabilitas;
6. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari materiil yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan kami dimasa yang akan datang.

Sangatta, 20 Januari 2026



# DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025

## 1. Apel Pagi dan Briefing PTSP setiap hari Senin



## 2. Apel Sore setiap hari Jumat



### 3. Penandatanganan MOU dengan Posbakum



### 4. Berpartisipasi Dalam Acara Donor Darah Dalam Rangka HUT PERSIT



### 5. Menghadiri Acara Purna Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Secara Daring





## 6. Rapat bulanan



## 7. Menghadiri Acara Halal Bihalal di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur





#### **8. Pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025**



#### **9. Simulasi Dan Pelatihan Menghadapi Kebakaran**



**10. Rapat Evaluasi dan Monitoring kesekretariatan dan kepaniteraan secara virtual bersama PN-PN Se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**





#### 11. Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sangatta



#### 12. Public Campaign Pengadilan Negeri Sangatta



**13. Melaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117**



**14. Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU antara Pengadilan Negeri Sangatta dengan SLB Negeri Kutai Timur**





#### 15. Upacara Hari Lahir Pancasila



#### 16. Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana dan Petugas Lapas Bontang



**17. Opening Meeting dan Closing Meeting Asesment Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025**



**18. Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79**





**19. Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia**



**20. Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Pengadilan Negeri Sangatta**



**21. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitera Pengadilan Negeri Sangatta**



**22. Pelaksanaan Sita Eksekusi perkara Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Sgt jo nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Sgt**





**23. Upacara hari Kesaktian Pancasila**



**24. Pelaksanaan Simulasi Uji Subtansi Bagi Panitera Muda Pengadilan Tinggi dan Panitera Muda diLingkungan Peradilan Umum**



**25. Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda**



**26. Pengambilan Sumpah/Janji Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta**





**27. Melaksanakan Upacara Hari Pahlawan**



**28. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**





**29. Pelaksanaan Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Sangatta**



**30. Ibadah dan Rapat Natal KRISMA di Wilayah Kalimantan Timur**



**31. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**



**32. Pemeriksaan Setempat perkara nomor 54/Pdt.G/2025/PN Sgt**





### 33. Jumat Sehat dengan Senam Pagi



### 34. Jumat Bersih dengan Kerja Bakti





**35. Jum'at sehat disi dengan jalan santai**



**36. Opening Meeting Pengawasan Antar Bidang Periode Semester II**



**37. Pengawasan Bidang Oleh Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum**



**38. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata**





### 39. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana



### 40. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang PTIP





**41. Pengawasan Bidang Oleh Hakim Pengawas Bagian Umum dan Keuangan**



**42. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala**



**43. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas PTSP**



**44. Rapat berjenjang di Kepaniteraan**



#### 45. Rapat Berjenjang di Kesekretariatan

